

PELUANG DAN TANTANGAN PARADIPLOMASI INFORMAL DALAM MEMBANGUN KETAHANAN PANGAN DI PROVINSI LAMPUNG, INDONESIA - LOS RIOS, EKUADOR

Fitri Adi Setyorini^{1*}, M. Aris Pujiyanto²

^{1*}Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Jenderal Soedirman, Banyumas, Indonesia
E-mail: fitri.adi@unsoed.ac.id

^{2,3}Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Jenderal Soedirman, Banyumas,
Indonesia
E-mail: m.aris@unsoed.ac.id

ABSTRAK

Tulisan ini menganalisis peluang paradiplomasi sebagai strategi dalam membangun ketahanan pangan melalui studi kasus Provinsi Lampung, Indonesia, dan Provinsi Los Rios, Ekuador. Ketahanan pangan menjadi isu global yang semakin kompleks akibat perubahan iklim, pandemi, konflik geopolitik, dan ketimpangan ekonomi yang menyebabkan terganggunya rantai pasok dan produksi pangan. Kondisi ini mendorong perlunya pendekatan baru yang melibatkan aktor-aktor sub-nasional, seperti pemerintah daerah, dalam menjalin kerja sama internasional yang responsif dan adaptif. Dalam konteks ini, paradiplomasi memberikan ruang bagi daerah untuk menjalin kemitraan lintas batas secara langsung tanpa harus melalui jalur diplomatik formal pemerintah pusat. Namun, tantangan utama dalam paradiplomasi meliputi hambatan birokrasi dan perbedaan regulasi yang dapat memperlambat implementasi kebijakan dan pengelolaan kerjasama internasional. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi strategi, tantangan, dan hasil paradiplomasi kedua provinsi dalam memperkuat ketahanan pangan yang berkelanjutan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan teknik analisis tematik terhadap data sekunder dari dokumen kebijakan, laporan internasional, dan publikasi akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa paradiplomasi informal membuka peluang transfer teknologi pertanian berkelanjutan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan lintas daerah, serta pengembangan rantai nilai pangan yang berbasis keunggulan lokal. Meskipun belum terdapat MoU resmi, strategi paradiplomasi informal seperti partisipasi dalam pameran internasional, kunjungan delegasi, dan pertemuan dagang telah menjadi langkah awal yang efektif. Studi ini menyimpulkan bahwa paradiplomasi merupakan instrumen strategis yang dapat direplikasi oleh daerah lain dalam membangun ketahanan pangan lokal yang inklusif dan berdaya saing global.

Kata Kunci: Ketahanan Pangan; Kolaborasi Internasional; Lampung; Los Rios; Paradiplomasi

Diserahkan : 2025-03-12,
Direvisi : 2025-04-11,
Diterima : 2025-07-12,

Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial dilisensikan di bawah Lisensi | 154
Creative Commons Atribusi-NonKomersial
4.0 Internasional. (CC BY-NC 4.0)



ABSTRACT

This article analyzes the potential of paradiplomacy as a strategy to strengthen food security through a case study of Lampung Province, Indonesia, and Los Rios Province, Ecuador. Food security has become an increasingly complex global issue, driven by climate change, pandemics, geopolitical conflicts, and economic inequality, all of which have disrupted food supply chains and production systems. These conditions highlight the need for innovative approaches that involve sub-national actors, such as local governments, in fostering responsive and adaptive international cooperation. In this context, paradiplomacy offers a platform for regional governments to establish cross-border partnerships independently of central authorities. However, the main challenges in paradiplomacy include bureaucratic obstacles and regulatory differences, which may slow down the implementation of policies and the management of international cooperation. This study aims to explore the strategies, challenges, and outcomes of paradiplomatic initiatives undertaken by both provinces in promoting sustainable food security. The research employs a qualitative approach with a case study method and thematic analysis techniques on secondary data from policy documents, international reports, and academic publications. The findings indicate that paradiplomacy enables the transfer of sustainable agricultural technologies, the enhancement of human resource capacity through interregional training, and the development of food value chains based on local comparative advantages. Although no formal Memorandum of Understanding (MoU) has been signed, informal paradiplomatic strategies—such as participation in international exhibitions, delegation visits, and trade missions—have proven to be effective entry points. The study concludes that paradiplomacy serves as a strategic instrument that can be replicated by other regions seeking to build inclusive, resilient, and globally competitive local food systems.

Keywords: *Food Security; Internasional Collaboration; Lampung; Los Rios; Paradiplomacy*

PENDAHULUAN

Ketahanan pangan telah menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi dunia saat ini, terutama yang disebabkan oleh perubahan iklim, konflik, dan ketimpangan ekonomi. Lebih dari 800 juta orang di dunia mengalami kerawanan pangan kronis, dengan sebagian besar dari mereka berada di negara-negara berkembang. Perubahan iklim telah memperparah situasi ini, mempengaruhi produksi pangan secara signifikan di wilayah-wilayah yang bergantung pada pertanian, seperti Afrika dan Asia Tenggara (Food and Agriculture Organization, 2015). Pandemi Covid-19 juga memperburuk kondisi ketahanan pangan dengan mengganggu rantai pasok pangan dan memperbesar kesenjangan sosial ekonomi. Pandemi telah meningkatkan angka kemiskinan global dan memperlemah daya beli masyarakat, terutama di negara-negara berpendapatan rendah.

Salah satu daerah di Indonesia yang menghadapi sejumlah tantangan signifikan terkait ketahanan pangan adalah Provinsi Lampung. Pertama, ketergantungan pada produksi padi sebagai sumber pangan pokok, yang rentan terhadap perubahan iklim dan penurunan produktivitas lahan. Perubahan pola cuaca dan peningkatan suhu telah menyebabkan ketidakstabilan hasil panen, terutama di musim kemarau yang berkepanjangan, sehingga berdampak pada pasokan pangan lokal. Selain itu, pertumbuhan populasi yang cepat dan urbanisasi juga meningkatkan permintaan pangan, yang tidak selalu dapat diimbangi oleh produksi lokal. Hal ini menempatkan Lampung pada risiko ketergantungan impor pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, yang dapat mempengaruhi stabilitas pangan di provinsi tersebut. Kedua, ketersediaan teknologi pertanian yang kurang memadai memperparah ketidakmampuan Lampung dalam meningkatkan kapasitas produksinya.

Teknologi pertanian di Lampung, terutama di kalangan petani kecil, masih terbatas pada metode tradisional, yang membatasi efisiensi dan produktivitas hasil panen (Lestari, 2024).

Sementara itu, Provinsi Los Rios, Ekuador, juga menghadapi tantangan serupa dalam ketahanan pangan. Los Rios merupakan salah satu daerah penghasil utama produk pertanian, termasuk padi, jagung, dan kedelai, yang sangat bergantung pada kondisi iklim dan cuaca untuk mendukung produksi pertanian. Namun, daerah ini mengalami dampak signifikan akibat perubahan iklim yang memperburuk hasil pertanian. Peningkatan frekuensi bencana alam seperti banjir dan kekeringan telah mempengaruhi kapasitas daerah dalam mempertahankan hasil pertanian yang stabil. Sebagai contoh, banjir yang terjadi setiap tahun mengakibatkan kerusakan tanaman, sementara kekeringan yang berkepanjangan mengurangi hasil panen pada musim-musim tertentu. Produksi padi di Los Rios mengalami penurunan sebesar 10% dalam lima tahun terakhir akibat perubahan cuaca ekstrem yang mempengaruhi kestabilan hasil pertanian (FAO, 2021).

Selain itu, Los Rios menghadapi masalah besar terkait akses terhadap teknologi pertanian modern yang dapat meningkatkan produktivitas pertanian. Sebagian besar petani di daerah ini masih bergantung pada metode pertanian tradisional yang kurang efisien, sementara teknologi baru yang dapat meningkatkan hasil pertanian dan mengurangi dampak perubahan iklim belum banyak diterapkan. Infrastruktur yang terbatas, terutama di daerah pedesaan, juga menjadi hambatan bagi para petani untuk mengakses pasar yang lebih luas dan untuk memperkenalkan teknologi baru yang dapat memperbaiki sistem pertanian. Kurangnya pengelolaan sumber daya alam yang efisien, baik dalam hal air maupun tanah, turut memperburuk potensi produksi pertanian di wilayah ini. Oleh karena itu, untuk meningkatkan ketahanan pangan di Los Rios, dibutuhkan upaya lebih dalam mengadopsi teknologi pertanian modern dan memperbaiki infrastruktur yang ada (World Bank, 2019).

Kondisi ini memperlihatkan betapa rentannya sistem pangan dalam menghadapi krisis yang tiba-tiba dan menunjukkan pentingnya pendekatan multilateral untuk mengatasi kerawanan pangan (United Nations Children's Emergency Fund, 2022). Ancaman terhadap ketahanan pangan ini semakin memperlihatkan perlunya kolaborasi global yang inovatif dan berkelanjutan. Hal ini memaksa Pemerintah Provinsi Lampung untuk mencari pendekatan baru yang dapat membantu memperkuat ketahanan pangan lokal, terutama melalui kebijakan berbasis kolaborasi. Salah satu pendekatan yang muncul adalah paradiplomasi, yang memungkinkan pemerintah daerah untuk menjalin kerjasama lintas batas demi mencapai tujuan bersama. Paradiplomasi menjadi solusi strategis untuk memitigasi dampak perubahan global terhadap sistem pangan lokal (Khoerunnisa & Maulana, 2023). Kolaborasi ini tidak hanya memperkuat kemandirian pangan lokal, tetapi juga memungkinkan adaptasi lebih baik terhadap perubahan global yang berdampak pada sistem pangan di tingkat lokal.

Paradiplomasi menawarkan peluang unik bagi pemerintah daerah untuk menjalin hubungan diplomatik langsung dengan wilayah asing, tanpa harus melalui pemerintah pusat. Hal ini sangat relevan dalam konteks ketahanan pangan, karena masalah pangan sering kali lebih mendesak di tingkat lokal daripada di tingkat nasional. Kolaborasi ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas produksi pangan melalui pertukaran teknologi dan pengetahuan yang relevan dengan kondisi pertanian masing-masing wilayah, sehingga dapat meningkatkan ketahanan pangan masyarakat setempat (Fathun, 2021). Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peluang, strategi, dan tantangan paradiplomasi antara Provinsi Lampung, Indonesia dan Los Rios, Ethiopia dalam membangun ketahanan pangan lokal.

Penelitian ini juga memiliki nilai inovasi yang tinggi, karena menggali konsep paradiplomasi dalam konteks ketahanan pangan, sebuah topik yang masih minim kajian empiris. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih berfokus pada paradiplomasi dalam bidang ekonomi atau budaya, sementara ketahanan pangan sering kali dianggap sebagai isu nasional (Mukti et al., 2021). Dengan memfokuskan studi pada ketahanan pangan, penelitian ini menawarkan perspektif baru yang dapat memperkaya kajian paradiplomasi di tingkat lokal. Paradigma ini sangat relevan di era globalisasi, di mana tantangan lokal sering kali memerlukan solusi global. Hal ini diharapkan dapat membuka ruang bagi kebijakan baru yang mendukung ketahanan pangan berbasis kerjasama antar-daerah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah lain yang ingin mengadopsi pendekatan serupa.

Urgensi penelitian ini menjadi lebih nyata di tengah meningkatnya krisis ketahanan pangan global yang menuntut pendekatan yang lebih inovatif dan efektif. Data menunjukkan bahwa ketergantungan pada impor pangan telah membuat banyak negara berkembang rentan terhadap fluktuasi harga internasional (Food and Agriculture Organization, 2015). Dalam konteks ini, kolaborasi antar-daerah melalui paradiplomasi dapat menjadi solusi yang strategis untuk meningkatkan produksi dan kemandirian pangan. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat teridentifikasi model-model kolaborasi yang efektif dalam mendukung ketahanan pangan, yang dapat menjadi referensi bagi daerah lain di Indonesia maupun di negara berkembang lainnya. Temuan dari penelitian ini tidak hanya penting bagi para akademisi, tetapi juga bagi pembuat kebijakan yang tertarik untuk menerapkan paradiplomasi sebagai bagian dari strategi ketahanan pangan. Melalui studi ini, diharapkan dapat diperoleh wawasan yang mendalam tentang potensi dan tantangan paradiplomasi dalam membangun ketahanan pangan yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

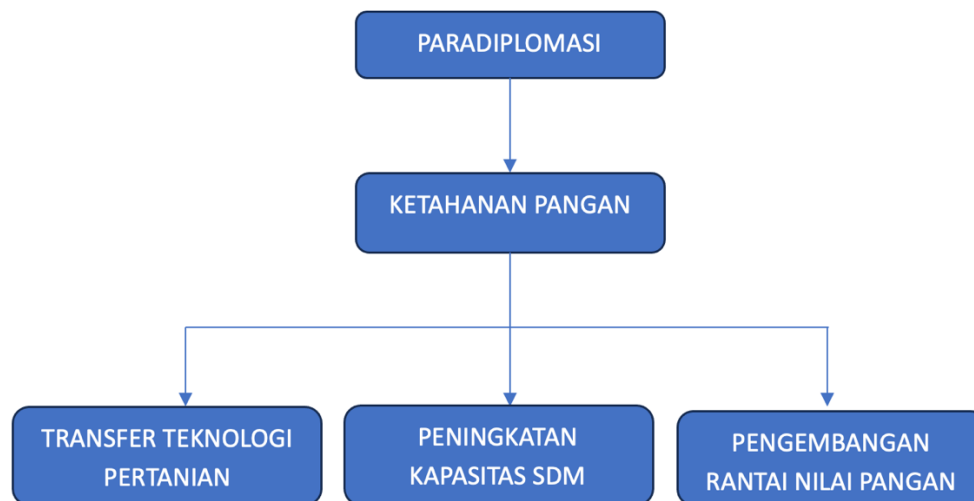
KAJIAN TEORI

Paradiplomasi didefinisikan sebagai upaya diplomasi yang dilakukan oleh entitas sub-nasional, seperti kota atau provinsi, untuk menjalin hubungan internasional secara independen dari pemerintah pusat. Konsep ini semakin relevan dalam konteks globalisasi, di mana entitas sub-nasional semakin berperan dalam mengatasi isu global, termasuk ketahanan pangan. Paradiplomasi dapat menjadi alat yang efektif untuk memperkuat kapasitas lokal dalam menghadapi tantangan global melalui kolaborasi lintas batas. Penelitian menunjukkan bahwa kota dan provinsi dapat memanfaatkan jejaring internasional untuk mendapatkan sumber daya dan teknologi yang mendukung ketahanan pangan (Keating, 2020). Keterlibatan entitas lokal dalam paradiplomasi juga memungkinkan adaptasi kebijakan yang lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat lokal.

Paradiplomasi sering didukung oleh desentralisasi kekuasaan, yang memungkinkan pemerintah daerah mengembangkan strategi diplomatik yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Teori desentralisasi menjelaskan bahwa ketika kewenangan didistribusikan ke tingkat lokal, pemerintah daerah memiliki otonomi lebih besar dalam pengambilan keputusan strategis, termasuk dalam menjalin kerja sama internasional (Utomo, 2022). Contohnya, di Indonesia, otonomi daerah pasca-reformasi memungkinkan provinsi-provinsi seperti Lampung untuk melakukan kerja sama langsung dengan wilayah internasional dalam bidang ketahanan pangan. Kemampuan daerah untuk mengakses teknologi pertanian modern, menjalin kemitraan dagang, dan berbagi pengetahuan dengan wilayah mitra di luar negeri menjadi bukti konkret bagaimana desentralisasi memperkuat praktik paradiplomasi. Dalam konteks global, berbagai kota di

Eropa dan Amerika Latin juga memanfaatkan desentralisasi untuk memperluas jejaring internasional yang berdampak positif pada ketahanan pangan lokal

Untuk memperkaya analisis dalam konteks paradiplomasi dan ketahanan pangan, teori rantai nilai pangan menjadi landasan penting. Rantai nilai pangan mencakup seluruh proses produksi, pengolahan, distribusi, hingga konsumsi pangan yang terintegrasi dalam sistem ekonomi dan sosial. Melalui pendekatan rantai nilai, setiap tahapan dalam proses produksi hingga distribusi pangan dapat dioptimalkan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas. Paradiplomasi berperan dalam memperluas akses daerah terhadap teknologi pengolahan modern, peningkatan infrastruktur logistik, dan pengembangan pasar internasional untuk produk pangan lokal. Sebagai contoh, kerja sama paradiplomatik antara Provinsi Lampung dan Los Rios, Ekuador, bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan distribusi hasil pertanian melalui adopsi teknologi dan pertukaran pengetahuan dalam rantai nilai pangan.



Gambar 1. Peta Konsep Paradiplomasi dan Ketahanan Pangan

Jejaring merupakan aspek kunci dalam praktik paradiplomasi, memungkinkan entitas lokal untuk membentuk aliansi strategis dengan berbagai pihak. Melalui jejaring, pemerintah daerah dapat saling bertukar informasi, berbagi sumber daya, dan memperkuat kapasitas dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan. Jejaring paradiplomatik yang efektif dapat membantu daerah dalam mendapatkan akses ke teknologi pertanian maju dari wilayah mitra mereka. Studi ini menggarisbawahi pentingnya kolaborasi lintas batas dalam memperkuat keamanan pangan melalui transfer pengetahuan dan inovasi. Di era globalisasi, paradiplomasi juga berperan sebagai jembatan antara kebijakan global dan kebutuhan lokal. Paradiplomasi memungkinkan pemerintah daerah merespons tantangan global secara fleksibel melalui solusi berbasis lokal (Balzacq et al., 2020). Oleh karena itu, paradiplomasi menjadi alat strategis bagi pemerintah daerah untuk memperkuat posisi mereka dalam tatanan global yang dinamis.

Ketahanan pangan telah menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi dunia saat ini, mengingat ketersediaan pangan tidak lagi menjadi isu yang terbatas pada aspek produksi saja. Ketahanan pangan melibatkan empat dimensi utama, yaitu ketersediaan, akses, penggunaan, dan stabilitas pangan. Ketersediaan pangan mencakup produksi domestik, impor,

dan cadangan pangan; sementara akses mencakup kemampuan ekonomi individu untuk memperoleh pangan (Arif et al., 2020). Stabilitas dan pemanfaatan pangan juga mencakup faktor distribusi dan bagaimana pangan diakses secara merata oleh seluruh populasi. Dengan semakin besarnya tekanan dari berbagai faktor global, memastikan setiap orang memiliki akses yang berkelanjutan terhadap pangan bergizi adalah tantangan yang kompleks dan multidimensi.

Pendekatan paradiplomasi atau diplomasi subnasional semakin relevan dalam menghadapi tantangan ini. Daerah yang memiliki otonomi untuk mengembangkan strategi sendiri, seperti provinsi atau kota, dapat menjalin kemitraan internasional yang mendukung ketahanan pangan lokal melalui kolaborasi dengan entitas serupa di negara lain. Pada konteks ketahanan pangan, paradiplomasi dapat menjadi instrumen penting dalam memperkuat kemandirian pangan lokal melalui kolaborasi internasional. Paradiplomasi memungkinkan daerah untuk berbagi teknologi dan pengetahuan dengan wilayah lain yang memiliki tantangan serupa. Paradiplomasi juga mendorong inovasi dalam praktik pertanian yang dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi pangan. Dengan demikian, paradiplomasi menyediakan solusi alternatif yang efektif untuk meningkatkan ketahanan pangan di tingkat lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis peran paradiplomasi dalam membangun ketahanan pangan lokal melalui studi kasus Provinsi Lampung dan Provinsi Los Rios. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali pemahaman mendalam tentang fenomena kompleks yang melibatkan kerjasama lintas wilayah dalam konteks ketahanan pangan (Creswell, 2014). Studi kasus dipilih sebagai metode utama karena dapat mengeksplorasi secara detail strategi, tantangan, dan dampak yang dialami oleh kedua provinsi dalam penerapan paradiplomasi. Metode ini dianggap paling relevan karena dapat menggambarkan dinamika lokal secara menyeluruh dan kontekstual.

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber utama. Data sekunder dipilih karena beberapa alasan strategis. Pertama, akses terhadap data primer dalam bentuk wawancara langsung dengan pemerintah daerah di Lampung dan Los Rios mengalami keterbatasan, terutama karena kendala geografis dan perbedaan regulasi internasional. Kedua, pandemi COVID-19 turut membatasi mobilitas dan interaksi langsung dengan para pemangku kepentingan di kedua wilayah, sehingga pengumpulan data primer menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, penelitian ini memaksimalkan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber terpercaya seperti laporan organisasi internasional, artikel jurnal, buku, dan dokumen resmi pemerintah daerah. Data sekunder memungkinkan penelitian ini untuk mengakses informasi yang telah diverifikasi dan relevan dengan topik penelitian (Johnston, 2017).

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka yang mencakup berbagai sumber akademis dan non-akademis yang relevan dengan topik penelitian. Studi pustaka mencakup buku, artikel jurnal, laporan dari organisasi internasional, dan kebijakan daerah yang relevan dengan paradiplomasi dan ketahanan pangan (Yin, 2018). Data yang dikumpulkan kemudian diorganisir berdasarkan kategori, seperti strategi paradiplomasi, tantangan ketahanan pangan, dan hasil kolaborasi. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih terstruktur dan

sistematis, sehingga memudahkan dalam mengidentifikasi pola-pola penting. Dengan cara ini, data dapat diseleksi untuk memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis tematik, yang memungkinkan identifikasi tema-tema utama dari data yang telah dikumpulkan. Teknik analisis tematik digunakan untuk menemukan pola-pola dan tema yang relevan dengan peran paradiplomasi dalam ketahanan pangan (Christou, 2022). Data dari berbagai sumber dianalisis untuk mengidentifikasi konsep-konsep yang sering muncul, seperti peningkatan kapasitas lokal, transfer teknologi, dan kolaborasi lintas batas. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak dan efektivitas paradiplomasi dalam konteks ketahanan pangan.

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber sekunder. Triangulasi membantu meningkatkan keakuratan temuan dengan mengkonfirmasi data dari sumber yang berbeda (Creswell, 2014). Data dari laporan FAO, misalnya, akan dibandingkan dengan artikel jurnal dan dokumen pemerintah untuk memastikan konsistensi informasi terkait ketahanan pangan dan paradiplomasi. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan hasil yang kredibel dan objektif dalam mengevaluasi praktik paradiplomasi antara Lampung dan Los Rios. Dengan triangulasi ini, penelitian dapat memberikan hasil yang lebih andal dan komprehensif.

PEMBAHASAN

Analisis Potensi Kerjasama antara Provinsi Lampung, Indonesia dan Los Rios, Ekuador

Provinsi Lampung dan Los Rios memiliki kesamaan dalam sektor pertanian sebagai tulang punggung perekonomian lokal. Meskipun demikian, karakteristik geografis dan komoditas unggulan di masing-masing provinsi menunjukkan variasi yang signifikan. Untuk memperlihatkan potensi dan perbedaan ini secara jelas, berikut disajikan tabel perbandingan antara kedua provinsi:

Tabel 1. Perbandingan Potensi Provinsi Lampung, Indonesia dan Provinsi Los Rios, Ekuador

No	Aspek	Provinsi Lampung, Indonesia	Provinsi Los Rios, Ecuador
1	Luas Wilayah	34.623,3 km ²	18.429 km ²
2	Jumlah Penduduk	9 juta jiwa	800 ribu jiwa
3	Infrastruktur Utama	Pelabuhan Panjang, Pelabuhan Bakauheni, Bandar Radin	Pelabuhan Valdivia, Terminal Agroindustrial
4	Iklim	Tropis, Curah Hujan Tinggi	Sedang, Musim Dingin Sejuk
5	Topografi	Dataran Rendah, Perbukitan	Sungai, Lahan Basah
6	Ekonomi Unggulan	Pertanian, Perikanan	Perkebunan, Pertanian, Peternakan
7	Komoditas Utama	Kopi, Lada, Singkong, Beras, Jagung	Blueberry, Kiwi, Apel, Susu

Berdasarkan data di atas, Provinsi Lampung memiliki luas wilayah yang lebih besar dan populasi yang lebih padat dibandingkan dengan Los Rios. Sementara itu, Los Rios unggul dalam produksi buah-buahan dan produk susu yang berorientasi ekspor. Kedua wilayah memiliki fokus ekonomi pada sektor pertanian, namun perbedaan iklim dan topografi menciptakan keragaman komoditas yang dihasilkan.

Provinsi Lampung dan Los Rios memiliki potensi signifikan dalam mendukung ketahanan pangan lokal yang terintegrasi dengan ekonomi global. Provinsi Lampung dan Los Rios memiliki fokus yang sama pada sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi lokal. Lampung dikenal dengan produksi komoditas unggulan seperti kopi robusta, lada, dan singkong, yang tidak hanya memenuhi kebutuhan domestik tetapi juga untuk ekspor. Sementara itu, Los Rios memanfaatkan iklim sedangnya untuk menghasilkan produk seperti blueberry, kiwi, dan produk olahan susu, yang memiliki pasar ekspor global yang kuat. Kedua wilayah memanfaatkan sumber daya alam lokal secara optimal untuk memastikan keberlanjutan produksi. Pendekatan ini mencerminkan pentingnya sektor pertanian dalam menyediakan lapangan kerja serta mendukung ketahanan pangan di tingkat nasional dan regional (FAO, 2024).

Lampung dan Los Rios memainkan peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional di negara masing-masing. Lampung menjadi salah satu lumbung pangan Indonesia, mendukung distribusi kebutuhan pokok seperti beras dan jagung ke wilayah lain. Los Rios, di sisi lain, berkontribusi pada ketahanan pangan Chili dengan produksi produk susu dan buah-buahan berkualitas tinggi yang memenuhi standar nasional dan internasional. Keduanya menunjukkan bagaimana wilayah dengan basis agraris yang kuat dapat mendukung stabilitas pangan melalui distribusi domestik dan diversifikasi produk. Peran ini menjadi semakin relevan dalam konteks meningkatnya tantangan global seperti perubahan iklim dan ketidakstabilan ekonomi (World Bank Group, 2025).

Selain itu, Lampung maupun Los Rios memiliki institusi lokal yang aktif mendukung pengelolaan sumber daya dan pengembangan pertanian. Di Lampung, lembaga seperti Badan Ketahanan Pangan dan institusi pendidikan seperti Universitas Lampung memainkan peran penting dalam penelitian dan advokasi kebijakan pangan. Los Rios, dengan dukungan dari Universitas Austral Chile dan asosiasi petani lokal, berhasil mengembangkan teknologi ramah lingkungan untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Kehadiran komunitas lokal yang aktif juga menjadi fondasi penting bagi pelestarian sumber daya alam dan pengelolaan pangan berkelanjutan. Kerjasama institusi ini menjadi kunci keberhasilan dalam mengintegrasikan kepentingan lokal dengan kebutuhan nasional dan global.

Selain persamaan, Lampung dan Los Rios juga memiliki perbedaan. Lampung dan Los Rios memiliki iklim dan kondisi geografis yang sangat berbeda, yang memengaruhi karakteristik pertanian di kedua wilayah. Lampung beriklim tropis dengan curah hujan tinggi, sehingga cocok untuk tanaman seperti kopi robusta, singkong, dan lada. Sebaliknya, Los Rios memiliki iklim sedang dengan musim dingin yang sejuk, ideal untuk tanaman seperti blueberry, apel, dan produk susu. Geografi Lampung yang mencakup dataran rendah hingga pegunungan vulkanik memfasilitasi pertanian beragam skala, sedangkan Los Rios terkenal dengan ekosistem sungai dan lahan basahnya. Perbedaan iklim dan geografi ini menciptakan variasi dalam hasil produksi, teknologi yang digunakan, dan pasar yang dituju (Gonzalez, 2023).

Pola produksi di Lampung cenderung didominasi oleh perkebunan skala kecil dengan keterlibatan tinggi dari petani lokal. Teknologi yang digunakan seringkali masih tradisional,

meskipun ada peningkatan adopsi alat mekanisasi dan irigasi modern dalam beberapa tahun terakhir. Sebaliknya, di Los Rios, penggunaan teknologi canggih seperti sistem irigasi pintar, drone untuk pemantauan lahan, dan pengelolaan berbasis data menjadi umum, didukung oleh kerjasama dengan universitas dan sektor swasta. Los Rios juga lebih fokus pada praktik pertanian berkelanjutan dan organik untuk meningkatkan daya saing global. Hal ini mencerminkan perbedaan tingkat akses terhadap teknologi serta prioritas pasar antara kedua wilayah (Tatiana et al., 2022).

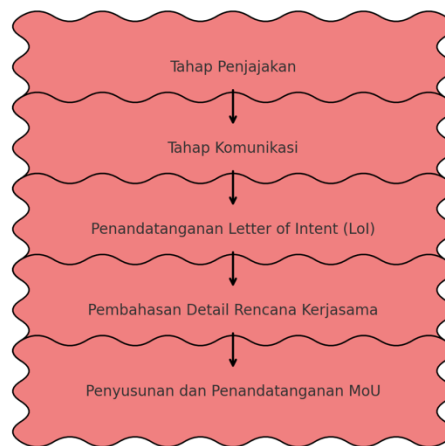
Regulasi lokal di Lampung lebih banyak berfokus pada peningkatan produktivitas petani kecil dan distribusi pangan domestik, terutama untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri Indonesia. Pemerintah daerah sering menyediakan subsidi pupuk dan program pelatihan bagi petani untuk meningkatkan hasil panen. Di sisi lain, regulasi di Los Rios diarahkan pada peningkatan standar kualitas produk untuk pasar internasional, termasuk sertifikasi organik dan pengelolaan keberlanjutan. Chili juga memiliki kebijakan perdagangan yang lebih liberal, mendukung ekspor besar-besaran hasil pertanian ke Eropa dan Amerika Utara. Perbedaan dalam regulasi ini mencerminkan pendekatan unik masing-masing wilayah terhadap pasar lokal dan global (FAO, 2024).

Keterhubungan global semakin relevan mengingat kedua wilayah berada di negara yang terintegrasi dengan pasar internasional melalui berbagai perjanjian perdagangan. Lampung memanfaatkan pasar ekspor melalui sektor perkebunan, terutama kopi yang diekspor ke berbagai negara di Asia dan Eropa. Los Rios, di sisi lain, memainkan peran penting dalam rantai pasokan global untuk produk pangan organik dan hasil olahan susu yang diekspor ke Amerika Utara dan negara-negara Eropa.

Kolaborasi strategis antara Lampung dan Los Rios dapat menciptakan model inovasi pertanian yang mengadopsi pendekatan teknologi ramah lingkungan. Inisiatif seperti pertukaran teknologi pertanian pintar dan pengelolaan air dapat meningkatkan produktivitas pangan di kedua wilayah. Dengan keterlibatan pemerintah daerah dan dukungan kebijakan yang mendorong koneksi internasional, paradigma ini dapat memperluas ketahanan pangan lokal sambil memperkuat daya saing dalam pasar global.

Paradiplomasi Informal sebagai Strategi Membangun Ketahanan Pangan

Dalam era globalisasi yang semakin mengintegrasikan berbagai wilayah di dunia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 hadir sebagai landasan strategis bagi pemerintah daerah untuk menjalin hubungan lintas batas melalui mekanisme sister city, membuka peluang kolaborasi internasional yang dapat memperkuat pembangunan lokal. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri mengatur mekanisme administrasi pembentukan kerja sama sister city.



Gambar 2. Mekanisme Administrasi Pembentukan *Sister City* Melalui Paradiplomasi

Tahap penjajakan merupakan langkah awal dalam proses pembentukan kerja sama sister city, di mana pemerintah daerah melakukan komunikasi awal dengan calon mitra luar negeri untuk mengidentifikasi potensi kolaborasi yang saling menguntungkan. Pada tahap ini, kedua belah pihak bertukar informasi mengenai kebutuhan, kapasitas, dan prioritas masing-masing, serta menilai kesesuaian untuk menjalin kemitraan. Proses ini melibatkan analisis mendalam terhadap potensi ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat dikembangkan bersama. Selain itu, pertimbangan terhadap kesamaan visi dan misi pembangunan daerah menjadi faktor penting dalam menentukan kelayakan kerja sama. Tahap penjajakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kerja sama yang akan dibangun memiliki dasar yang kuat dan berkelanjutan (Anwar, 2022).

Provinsi Lampung, Indonesia, dan Provinsi Los Rios, Ekuador, telah memulai melakukan tahap penjajakan untuk membangun kerja sama sister province pada Mei 2017. Pada 16 Mei 2017, Duta Besar Republik Indonesia untuk Ekuador, Diennaryati Tjokrosuprihatono, bertemu dengan Gubernur Lampung, M. Ridho Ficardo, di Bandar Lampung untuk membahas rencana kerja sama sister province antara kedua wilayah tersebut. Dalam tahapan pertama ini, kedua provinsi mengidentifikasi potensi kolaborasi di sektor pertanian dan perkebunan, karena keduanya memiliki kesamaan dalam komoditas unggulan seperti pisang dan kelapa sawit. Melalui pertukaran informasi dan kunjungan delegasi, mereka menilai kesesuaian dan manfaat yang dapat diperoleh dari kerja sama tersebut. Proses penjajakan ini juga melibatkan diskusi mengenai tantangan dan peluang yang mungkin dihadapi dalam implementasi kerja sama. Hasil dari tahap ini menjadi dasar bagi langkah selanjutnya dalam membangun kemitraan yang strategis dan berkelanjutan (Bappeda Provinsi Lampung, 2017).

Selanjutnya, tahap komunikasi digunakan untuk mematangkan materi kerja sama yang telah disiapkan pada tahap sebelumnya. Pada tahap ini, kedua pemerintah daerah melakukan diskusi mendalam untuk menyusun rencana kolaborasi yang mencakup bidang pertanian, pendidikan, dan pariwisata. Melalui komunikasi intensif, kedua pihak membahas kemungkinan transfer teknologi pertanian dan program peningkatan kapasitas petani. Hasil dari komunikasi ini kemudian dituangkan dalam Letter of Intent (LoI), yang berfungsi sebagai pernyataan niat bersama untuk menjalin kerja sama lebih lanjut. Penandatanganan LoI oleh kedua belah pihak

telah dilaksanakan pada 23 Agustus 2023 yang menandai komitmen awal untuk bekerja sama, meskipun belum memiliki kekuatan hukum sebagai perjanjian resmi (Bappeda Provinsi Lampung, 2017). Penandatanganan LoI menjadi landasan untuk melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu pembahasan detail rencana kerja sama dan penyusunan Memorandum of Understanding (MoU). Proses ini menunjukkan bagaimana paradiplomasi dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan ketahanan pangan lokal melalui kolaborasi internasional yang strategis.

Setelah penandatanganan LoI, tahap berikutnya adalah pembahasan detail rencana kerja sama, termasuk pengajuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mendapatkan persetujuan. Pada tahap ini, pemerintah daerah menyusun proposal kerja sama yang komprehensif, mencakup tujuan, ruang lingkup, manfaat, dan implikasi hukum dari kerja sama yang diusulkan. DPRD kemudian meninjau proposal tersebut untuk memastikan kesesuaiannya dengan kepentingan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Persetujuan DPRD menjadi syarat penting sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Jika disetujui, pemerintah daerah dapat melanjutkan ke tahap penyusunan dan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU).

Meskipun terdapat inisiatif untuk membentuk kerja sama sister province antara Provinsi Lampung, Indonesia, dan Provinsi Los Rios, Ekuador, hingga saat ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung belum memberikan persetujuan resmi terkait pembentukan tersebut. Kunjungan Duta Besar Indonesia untuk Ekuador pada Mei 2017 telah membahas potensi kerja sama di sektor pertanian dan perkebunan antara kedua provinsi (Dinas Kominfo Provinsi Lampung, 2025). Ketiadaan persetujuan resmi dari DPRD Provinsi Lampung dapat menghambat implementasi kerja sama yang direncanakan, mengingat peran legislatif daerah dalam menyetujui perjanjian internasional pada tingkat provinsi. Ketiadaan persetujuan ini juga menghambat proses menuju tahap berikutnya, yaitu penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) sebagai dasar hukum kerja sama resmi. Kondisi ini menunjukkan perlunya sinergi lebih erat antara eksekutif dan legislatif di tingkat provinsi untuk mewujudkan paradigma paradiplomasi yang efektif.

Karena hingga saat ini belum terdapat Memorandum of Understanding (MoU) resmi antara Provinsi Lampung, Indonesia, dan Provinsi Los Rios, Ekuador, paradiplomasi informal dapat menjadi langkah awal yang strategis untuk memulai kerja sama. Paradiplomasi informal memungkinkan kedua pihak untuk menjalin hubungan melalui diskusi bilateral, kegiatan bersama, atau pertukaran praktik terbaik tanpa keterikatan legal yang kompleks. Paradiplomasi informal dapat dimulai dengan beberapa kegiatan di antaranya sebagai berikut:

Pertama, pertemuan dagang untuk membangun ekonomi. Pertemuan dagang menjadi sarana efektif untuk membangun hubungan bisnis antarprovinsi, seperti yang terjadi antara Lampung dan Los Rios. Pertemuan dagang ini memungkinkan pengusaha dan instansi lokal dari kedua wilayah untuk saling berbagi informasi tentang peluang pasar dan inovasi produk pertanian, tanpa terikat pada formalitas perjanjian. Kegiatan ini juga memfasilitasi negosiasi langsung mengenai kerjasama perdagangan komoditas unggulan, seperti kopi Lampung dan produk susu dari Los Rios. Oleh karena itu, pertemuan dagang menjadi pilar dalam menciptakan konektivitas ekonomi tanpa membutuhkan struktur formal yang rumit (Rangga et al., 2021).

Kedua, pameran internasional sebagai platform kolaborasi. Pameran internasional menawarkan peluang bagi kedua provinsi untuk memperkenalkan produk mereka kepada

audiens global tanpa adanya MoU formal. Lampung, dengan komoditas seperti kopi dan udang, dapat memanfaatkan pameran untuk menjalin hubungan dengan pengusaha dan pemerintah dari negara lain, termasuk Chili. Di sisi lain, Los Rios, yang memiliki produk buah-buahan dan produk susu unggulan, dapat memperluas jejaring pasar di luar Amerika Latin. Pameran ini juga memberikan ruang untuk pembelajaran langsung tentang praktik terbaik di sektor pertanian dan pangan yang dapat diadaptasi oleh kedua provinsi. Melalui pameran internasional, kerjasama potensial dapat muncul tanpa harus terikat pada perjanjian resmi (World Bank Group, 2025).

Ketiga, kunjungan delegasi untuk memperkuat diplomasi ekonomi. Kunjungan delegasi adalah salah satu bentuk paradiplomasi informal yang memungkinkan pertukaran pengalaman dan eksplorasi peluang kerjasama langsung antara Lampung dan Los Rios. Kunjungan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman tentang keunggulan produk pangan masing-masing wilayah tetapi juga membuka jalan bagi diskusi lebih lanjut tentang kolaborasi jangka panjang. Melalui kunjungan, baik pihak pemerintah maupun swasta dapat melihat langsung kondisi pertanian, industri, serta potensi investasi yang dapat meningkatkan ketahanan pangan. Selain itu, kunjungan delegasi memberikan kesempatan untuk membangun relasi pribadi antara pemangku kebijakan yang dapat mempercepat terciptanya kesepakatan tanpa adanya formalitas yang menghambat (FAO, 2024).

Strategi paradiplomasi informal seperti partisipasi dalam pameran internasional sebagai platform kolaborasi, pertemuan dagang untuk memperkuat ekonomi, dan kunjungan delegasi guna memperkuat diplomasi ekonomi merupakan langkah strategis untuk mempercepat terwujudnya hubungan sister province antara Provinsi Lampung dan Provinsi Los Rios. Ketiga strategi ini memungkinkan terciptanya hubungan langsung dan konkret antara kedua provinsi, baik dalam pertukaran teknologi maupun pengembangan sektor pertanian dan UMKM. Selain itu, pendekatan informal ini dapat membangun fondasi kepercayaan yang kuat serta menjembatani perbedaan kebijakan dan regulasi yang mungkin menghambat kerja sama formal. Dengan memanfaatkan peluang ini, kedua provinsi dapat memperluas jaringan kerja sama dan meningkatkan kapasitas lokal dalam mendukung ketahanan pangan. Paradiplomasi informal menjadi pijakan awal yang signifikan untuk mempererat hubungan bilateral yang berorientasi pada keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

Hambatan Paradiplomasi dalam Mewujudkan Kerjasama Ketahanan Pangan

Paradiplomasi telah berkembang menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat hubungan internasional di tingkat sub-nasional, termasuk di bidang ketahanan pangan (Keating, 2020). Melalui paradiplomasi, pemerintah daerah memiliki kesempatan untuk menjalin kerjasama langsung dengan pemerintah daerah lain di luar negeri tanpa harus melalui prosedur diplomatik formal yang diatur pemerintah pusat. Kerjasama ini memungkinkan akses langsung terhadap teknologi, pengetahuan, dan praktik terbaik yang dapat meningkatkan kapasitas produksi pangan di tingkat lokal (Utomo, 2022). Dalam konteks Provinsi Lampung dan Los Rios, potensi kerjasama ini mencakup sektor pertanian dan distribusi pangan, di mana kedua wilayah memiliki karakteristik geografis dan ekonomi yang mirip. Namun, meskipun potensi tersebut besar, pelaksanaan paradiplomasi tidak selalu berjalan mulus. Tantangan administratif, birokrasi, dan regulasi lintas wilayah sering kali menjadi penghambat utama dalam mewujudkan kerjasama yang efektif dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, identifikasi dan pemahaman terhadap hambatan-hambatan tersebut menjadi krusial dalam merumuskan strategi yang lebih adaptif dan solutif.

Paradiplomasi membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah daerah, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dalam setiap proses perjanjian internasional yang melibatkan kerja sama lintas batas. Di Lampung, proses persetujuan dari DPRD menjadi salah satu hambatan utama dalam mengimplementasikan paradiplomasi secara formal dengan Provinsi Los Rios, Ekuador. Hingga saat ini, belum ada persetujuan resmi terkait pembentukan Memorandum of Understanding (MoU) antara kedua provinsi, meskipun diskusi dan komunikasi informal sudah dilakukan sejak tahun 2017 (Bappeda Provinsi Lampung, 2017). Salah satu alasan utama keterlambatan ini adalah proses birokrasi yang panjang dan berlapis di tingkat legislatif, di mana setiap rencana kerja sama internasional harus melalui serangkaian evaluasi dan sidang pleno. Tanpa adanya MoU formal, akses terhadap program pendanaan internasional menjadi sangat terbatas, sehingga upaya pengembangan teknologi pertanian dan peningkatan kapasitas SDM tidak dapat direalisasikan secara optimal (World Bank, 2021). Selain itu, minimnya kesepahaman antara pemerintah daerah dan DPRD mengenai urgensi kerja sama lintas negara menambah kompleksitas proses persetujuan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kendala birokrasi tidak hanya memperlambat proses paradiplomasi, tetapi juga menghambat optimalisasi peluang yang dapat meningkatkan ketahanan pangan lokal (Utomo, 2022).

Kegagalan penandatanganan MoU antara Lampung dan Los Rios pada kunjungan Duta Besar Indonesia ke Lampung pada tahun 2017 menjadi bukti nyata kendala birokrasi di level daerah (Bappeda Provinsi Lampung, 2017). Pada saat itu, agenda kerja sama internasional yang meliputi pertukaran teknologi pertanian dan penguatan rantai pasok pangan gagal direalisasikan karena tidak mendapatkan restu politik dari DPRD Lampung. Kondisi ini tidak hanya merugikan potensi kerja sama internasional, tetapi juga menghambat akses Lampung terhadap teknologi pertanian modern yang dimiliki oleh Los Rios. Selain itu, tidak adanya kesepakatan formal juga berdampak pada rendahnya alokasi anggaran daerah untuk mendukung program paradiplomasi. Padahal, kerja sama formal melalui MoU dapat membuka akses terhadap pendanaan internasional dan kemitraan yang lebih luas (Keating, 2020).

Selain itu, paradiplomasi di Indonesia sering kali terbentur oleh perbedaan regulasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang berdampak signifikan pada implementasi kerja sama internasional di tingkat sub-nasional. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, pemerintah pusat memiliki otoritas utama dalam menjalin perjanjian internasional, sementara pemerintah daerah hanya memiliki kewenangan terbatas dalam kerja sama lintas negara. Regulasi tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, yang menetapkan bahwa semua kerja sama internasional harus melalui persetujuan pemerintah pusat (Utomo, 2022). Akibatnya, pemerintah daerah yang ingin menginisiasi program paradiplomasi sering kali terhambat oleh birokrasi panjang dan berlapis. Pemerintah daerah harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Kementerian Luar Negeri dan instansi terkait sebelum dapat melaksanakan program tersebut. Tidak jarang, proses perizinan yang panjang tersebut menyebabkan tertundanya program kerja sama internasional, termasuk di sektor pertanian dan ketahanan pangan. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan regulasi antara pusat dan daerah menjadi salah satu kendala terbesar dalam memperkuat jejaring paradiplomasi di tingkat lokal (Keating, 2020).

Kerjasama pertanian yang direncanakan antara Lampung dan Los Rios, Ekuador, merupakan salah satu contoh nyata dari hambatan regulasi ini. Meskipun kedua belah pihak telah melakukan komunikasi informal, proses formalisasi melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) gagal terealisasi akibat ketidaksesuaian regulasi antara pemerintah daerah dan pusat (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, 2025). Pemerintah pusat menetapkan regulasi ekspor-impor yang ketat dan proteksi terhadap produk lokal, yang menghalangi akses langsung Lampung untuk mengeksport produk unggulannya ke Los Rios. Selain itu, kebijakan desentralisasi yang tidak diikuti oleh pelimpahan kewenangan diplomasi internasional mengakibatkan pemerintah daerah tidak bisa mengambil keputusan strategis secara mandiri (Probowati, 2022). Hal ini menghambat upaya Lampung untuk memperluas pasar ekspor produk pangan, yang sebenarnya memiliki potensi besar di Ekuador.

Ketiga, pendanaan menjadi salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan paradiplomasi, terutama di wilayah yang memiliki keterbatasan anggaran daerah seperti Provinsi Lampung. Hingga saat ini, APBD Lampung belum mengalokasikan dana khusus yang signifikan untuk mendukung kegiatan paradiplomasi secara optimal, sehingga banyak program kerja sama internasional yang tidak dapat direalisasikan. Keterbatasan alokasi anggaran ini disebabkan oleh fokus anggaran daerah yang lebih banyak dialokasikan pada program infrastruktur dan pelayanan publik, sementara inisiatif internasional masih dianggap sebagai prioritas sekunder (Probowati, 2022). Selain itu, pemerintah pusat tidak menyediakan skema pendanaan khusus bagi daerah yang ingin menginisiasi kerja sama internasional tanpa adanya Memorandum of Understanding (MoU) yang jelas. Hal ini menyebabkan pemerintah daerah sulit untuk mengikuti pameran internasional, kunjungan delegasi, dan pelatihan lintas daerah yang seharusnya menjadi bagian penting dari paradiplomasi. Akibatnya, kesempatan untuk mempromosikan produk unggulan daerah dan membangun jejaring internasional menjadi sangat terbatas. Minimnya dukungan finansial ini menunjukkan bahwa keberhasilan paradiplomasi tidak hanya bergantung pada kemauan politik, tetapi juga pada dukungan anggaran yang memadai (Lestari, 2024).

Keterbatasan anggaran ini juga berdampak pada rendahnya investasi dalam riset dan pengembangan teknologi pertanian di Lampung dan Los Rios. Padahal, salah satu tujuan utama paradiplomasi adalah meningkatkan kapasitas pertanian melalui alih teknologi dan inovasi lintas negara. Dalam praktiknya, upaya untuk mengadopsi teknologi pertanian modern sering kali gagal dilakukan karena kurangnya dukungan finansial dari APBD maupun pemerintah pusat. Misalnya, pada tahun 2022, partisipasi Lampung dalam pameran internasional di Ekuador terbatas karena kendala pendanaan, sehingga potensi untuk membangun kemitraan strategis tidak dapat terealisasi dengan maksimal (Probowati, 2022).

Hambatan birokrasi, perbedaan regulasi, dan minimnya dukungan pendanaan menjadi tantangan utama dalam implementasi paradiplomasi antara Lampung dan Los Rios. Ketiga faktor tersebut tidak hanya menghambat proses formalitas kerja sama, tetapi juga memperlambat akses terhadap teknologi pertanian modern dan jejaring internasional yang dapat memperkuat ketahanan pangan lokal. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah dan pusat, dukungan legislatif yang lebih responsif, serta optimalisasi anggaran untuk mendukung inisiatif paradiplomasi secara berkelanjutan. Dengan perbaikan pada aspek birokrasi, harmonisasi regulasi, dan dukungan pendanaan, potensi kerja sama internasional yang lebih terstruktur melalui Memorandum of Understanding (MoU) akan semakin terbuka. Jika hambatan ini dapat diatasi secara strategis, paradiplomasi berpeluang

besar untuk menjadi instrumen penting dalam memperkuat ketahanan pangan di Lampung dan Los Rios. Keberhasilan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan produktivitas pertanian lokal, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui kolaborasi internasional. Dengan demikian, paradiplomasi dapat menjadi jembatan bagi pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan global di sektor pangan secara lebih mandiri dan berdaya saing tinggi

Proyeksi Dampak Kerjasama Formal di Masa Depan

Paradiplomasi formal antara Provinsi Lampung dan Los Rios memiliki potensi besar dalam memperkuat ketahanan pangan melalui kerja sama strategis yang terstruktur. Jika hambatan birokrasi dan regulasi dapat teratasi, kolaborasi formal akan membuka peluang untuk transfer teknologi, pengembangan rantai nilai pangan, dan peningkatan infrastruktur logistik secara signifikan. Kerja sama ini tidak hanya meningkatkan produktivitas pertanian dan daya saing internasional, tetapi juga memperluas akses pasar global bagi produk-produk unggulan kedua provinsi. Dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah dan regulasi yang terintegrasi, paradiplomasi formal ini diharapkan mampu mengakselerasi pembangunan ekonomi berbasis pangan secara berkelanjutan.

1. Transfer Teknologi dan Pengetahuan

Provinsi Los Rios di Ekuador memiliki keunggulan dalam pengelolaan hasil pertanian yang berkelanjutan, terutama di sektor perkebunan pisang dan produk hortikultura lainnya. Dengan pengalaman panjang dalam menerapkan teknologi ramah lingkungan, seperti penggunaan pupuk organik dan metode irigasi presisi, Los Rios dapat berbagi praktik terbaiknya kepada mitra internasional, termasuk Provinsi Lampung. Paradiplomasi memungkinkan transfer teknologi ini melalui program pelatihan petani, pertukaran tenaga ahli, dan dukungan teknologi. Dengan pengelolaan yang lebih berkelanjutan, Lampung dapat meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga kualitas lingkungan lokal. Kerja sama ini tidak hanya relevan untuk memperkuat ketahanan pangan lokal tetapi juga mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam aspek lingkungan (Probowati, 2022).

Provinsi Los Rios juga memiliki potensi besar dalam berbagi teknologi pascapanen untuk meningkatkan nilai tambah hasil pertanian. Teknologi seperti pengolahan produk segar menjadi produk olahan bernilai tinggi dan sistem penyimpanan dingin (cold storage) telah diterapkan secara luas di Los Rios, yang dapat diadaptasi oleh Lampung untuk memperkuat daya saing produk lokal di pasar domestik dan internasional. Hal ini menjadi peluang strategis, mengingat Lampung adalah salah satu penghasil utama hasil bumi di Indonesia, yang sering kali menghadapi kendala pada hilirisasi produk. Implementasi teknologi dari Los Rios dapat membantu Lampung mengurangi kerugian pascapanen dan meningkatkan efisiensi rantai pasokan. Kerja sama ini dapat dijembatani melalui perjanjian bilateral pada tingkat provinsi untuk memastikan implementasi yang efektif dan berkelanjutan (Malik, 2024).

Lebih jauh lagi, berbagi teknologi ini dapat membuka peluang riset bersama antara lembaga pendidikan dan penelitian dari kedua provinsi. Universitas lokal di Los Rios, yang memiliki spesialisasi dalam ilmu pertanian dan teknologi pengolahan, dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi di Lampung untuk mengembangkan teknologi baru yang sesuai

dengan kondisi lokal. Penelitian kolaboratif ini dapat menghasilkan inovasi berbasis lokal yang mendukung keberlanjutan sektor pertanian di kedua wilayah. Selain itu, program pertukaran mahasiswa dan dosen dapat menjadi bagian penting dalam memperkuat jejaring dan transfer pengetahuan antarprovinsi. Dengan dukungan kebijakan paradiplomasi yang tepat, peluang ini dapat dimaksimalkan untuk mencapai hasil yang saling menguntungkan bagi Provinsi Lampung dan Los Rios.

Selain itu, Lampung juga memiliki pengalaman dalam mengelola program pelatihan berbasis masyarakat yang dapat diadaptasi untuk konteks kerja sama internasional. Pelatihan seperti pengolahan hasil tani menjadi produk bernilai tambah, yang telah diterapkan di berbagai wilayah Lampung, dapat menjadi model bagi Los Rios. Program pelatihan ini tidak hanya meningkatkan produktivitas lokal tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru di sektor agribisnis. Dalam konteks kerja sama paradiplomasi, transfer pengetahuan dan keterampilan ini dapat menjadi landasan kuat untuk membangun ketahanan pangan di kedua wilayah. Dengan dukungan kebijakan dari pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait, kerja sama ini dapat berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan (Probowati, 2022).

Peluang ini semakin relevan mengingat Los Rios juga merupakan provinsi agraris yang membutuhkan penguatan kapasitas dalam manajemen sumber daya manusia di sektor pertanian. Melalui program paradiplomasi, Lampung dapat menawarkan solusi inovatif berbasis pengalaman lokal, seperti praktik pertanian ramah lingkungan yang telah berhasil diterapkan di wilayahnya. Pertukaran tenaga kerja terampil ini juga berpotensi meningkatkan daya saing kedua wilayah dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim dan kelangkaan sumber daya alam. Dengan demikian, kerja sama ini tidak hanya mendukung ketahanan pangan tetapi juga mempererat hubungan antar masyarakat kedua provinsi. Inisiatif ini mencerminkan peran strategis paradiplomasi sebagai instrumen untuk pembangunan lokal yang berkelanjutan (PPID Lampung, 2023).

2. Pembangunan Rantai Nilai Pangan

Kerja sama antara Provinsi Lampung dan Provinsi Los Rios memiliki potensi besar dalam mengembangkan produk-produk unggulan lokal untuk pasar internasional. Provinsi Lampung dikenal dengan produk unggulannya seperti kopi robusta, lada hitam, dan pisang, yang telah memiliki reputasi baik di pasar domestik maupun global. Di sisi lain, Provinsi Los Rios di Ekuador memiliki kekuatan dalam produksi kakao dan pisang, menjadikannya salah satu eksportir utama di Amerika Selatan. Kombinasi kekuatan kedua provinsi ini dapat membuka peluang untuk memperluas jangkauan pasar internasional melalui kolaborasi dalam branding, sertifikasi, dan distribusi produk-produk unggulan mereka. Dengan pendekatan yang terkoordinasi, kedua provinsi dapat saling berbagi pengetahuan mengenai praktik terbaik dalam pengelolaan agribisnis yang berkelanjutan dan ramah lingkungan (Villacis et al., 2022).

Selain itu, kerja sama ini dapat menciptakan sinergi dalam hal riset dan pengembangan (R&D) untuk meningkatkan kualitas dan inovasi produk. Provinsi Lampung, misalnya, dapat belajar dari pengalaman Los Rios dalam pengelolaan rantai pasok kakao, sementara Los Rios dapat mengadopsi teknologi pengolahan kopi yang sudah berkembang di Lampung. Keduanya juga dapat mengembangkan strategi pemasaran bersama untuk menembus pasar baru seperti Uni Eropa atau Asia Timur, yang memiliki permintaan tinggi terhadap produk berkualitas dengan sertifikasi keberlanjutan. Dengan

memanfaatkan kerja sama ini, Provinsi Lampung dan Los Rios tidak hanya dapat meningkatkan daya saing global tetapi juga mendorong perekonomian lokal melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan petani. Kerja sama ini menunjukkan potensi besar paradiplomasi dalam memperkuat ketahanan pangan lokal sekaligus meningkatkan akses ke pasar internasional (Raj et al., 2024).

3. Peningkatan Infrastruktur Distribusi dan Logistik Antar Wilayah

Paradiplomasi membuka peluang strategis bagi Provinsi Lampung dan Provinsi Los Rios untuk meningkatkan infrastruktur distribusi dan logistik sebagai upaya mendukung pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan. Kedua provinsi memiliki kesamaan sebagai wilayah agraris dengan hasil pertanian yang signifikan, sehingga peningkatan distribusi menjadi kebutuhan utama untuk memperluas akses pasar domestik dan internasional. Melalui kerja sama ini, Lampung dapat berbagi pengalaman dalam program Tol Laut Indonesia yang berfokus pada pengurangan disparitas harga dan peningkatan konektivitas antarwilayah. Di sisi lain, Los Rios dapat memberikan wawasan tentang pengelolaan sistem rantai pasok dingin (cold chain logistics), yang telah sukses diterapkan untuk menjaga kualitas produk pertanian di pasar global. Dengan saling bertukar pengetahuan dan pengalaman, kedua provinsi dapat memperkuat daya saing masing-masing dalam perdagangan internasional (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, 2025).

Peluang kerja sama ini juga mencakup pengembangan pelabuhan dan terminal logistik yang berperan sebagai pusat distribusi regional. Provinsi Lampung, sebagai salah satu penghasil utama hasil bumi di Sumatera, memerlukan infrastruktur pelabuhan yang lebih modern untuk mempercepat pengiriman barang ke wilayah lain maupun ke luar negeri. Paradiplomasi dengan Los Rios memungkinkan transfer teknologi dan investasi untuk membangun infrastruktur tersebut. Di sisi lain, Los Rios juga dapat belajar dari model distribusi Lampung yang memanfaatkan jaringan jalan darat dan laut secara terpadu. Pengembangan pelabuhan ini tidak hanya mempercepat distribusi barang tetapi juga menciptakan peluang kerja dan meningkatkan pendapatan daerah melalui aktivitas perdagangan (Pambudi & Handayani, 2023).

Paradiplomasi antara kedua provinsi juga dapat mendorong penggunaan teknologi logistik yang lebih efisien dan berkelanjutan. Kerja sama ini dapat mencakup adopsi teknologi seperti sistem pemantauan GPS untuk kendaraan distribusi, otomatisasi gudang, hingga pengembangan platform digital untuk manajemen logistik. Lampung, dengan dukungan dari Los Rios, dapat mengintegrasikan teknologi ini untuk meningkatkan efisiensi transportasi dan mengurangi biaya logistik yang selama ini menjadi tantangan. Sebaliknya, Los Rios dapat memperoleh manfaat dari pengalaman Lampung dalam mengoptimalkan jaringan distribusi dengan infrastruktur yang ada. Dengan teknologi yang lebih maju, distribusi barang dapat dilakukan secara lebih cepat dan dengan kualitas yang tetap terjaga (Sudrajat et al., 2024).

Kolaborasi ini juga dapat memperkuat hubungan perdagangan internasional kedua provinsi melalui jaringan logistik global. Provinsi Lampung, dengan potensi hasil bumi seperti kopi dan pisang, serta Los Rios dengan produk unggulan seperti kakao dan pisang, dapat menjalin kemitraan perdagangan yang lebih luas melalui peningkatan jalur logistik. Kerja sama ini memungkinkan kedua provinsi untuk memperluas ekspor ke pasar yang lebih besar, seperti Eropa dan Asia. Selain itu, keberadaan infrastruktur logistik yang

efisien juga mendukung penguatan ketahanan pangan dengan memastikan distribusi produk pertanian yang lebih merata dan berkelanjutan. Dengan demikian, paradiplomasi dalam peningkatan infrastruktur logistik menjadi langkah strategis bagi kedua provinsi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing global (Safa'atin & Denata, 2024).

KESIMPULAN

Dalam era globalisasi dan desentralisasi, paradiplomasi telah menjadi instrumen penting dalam mengatasi tantangan ketahanan pangan lokal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi paradiplomasi informal, seperti pameran internasional, pertemuan dagang, dan kunjungan delegasi, dapat memainkan peran signifikan dalam mempercepat terwujudnya hubungan sister province antara Provinsi Lampung dan Provinsi Los Rios. Ketiga pendekatan ini memungkinkan terciptanya kolaborasi langsung yang efektif dalam memperkuat sektor pertanian dan ekonomi lokal tanpa memerlukan formalitas MoU. Lebih jauh, strategi ini tidak hanya mendukung ketahanan pangan tetapi juga membuka peluang bagi kedua provinsi untuk saling berbagi teknologi dan keahlian. Dengan demikian, paradiplomasi informal menjadi langkah awal yang strategis untuk membangun hubungan bilateral yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Rekomendasi kebijakan:

1. Pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran khusus dalam APBD untuk mendukung aktivitas paradiplomasi, terutama dalam hal partisipasi internasional dan penguatan kapasitas kelembagaan.
2. Pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri, sebaiknya menyederhanakan prosedur persetujuan MoU antarwilayah luar negeri untuk mempercepat kolaborasi sub-nasional.
3. DPRD di tingkat provinsi perlu meningkatkan sinergi dengan eksekutif daerah agar dapat memahami urgensi kerjasama internasional di bidang ketahanan pangan dan mendukung proses legalisasi MoU.
4. Perlu dibentuk tim teknis lintas sektor (pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat) untuk merancang agenda kerjasama strategis yang berbasis kebutuhan lokal namun berskala global.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, D. (2022). Tata Cara Pembuatan Perjanjian Kerjasama antara Kota. *123dok*. https://123dok.com/article/ruang-lingkup-perjanjian-internasional-aspek-perjanjian-internasional.y6e38p2o?utm_source=chatgpt.com#google_vignette
- Arif, S., Isdijoso, W., Fatah, A. R., & Tamyis, A. R. (2020, Agustus). *Tinjauan Strategis Ketahanan Pangan dan Gizi di Indonesia*. The SMERU Research Institute. https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000120011/download/?_ga=2.90760281.2141861004.1729486604-1958652113.1729486604
- Balzacq, T., Charillon, F., & Ramel, F. (Eds.). (2020). *Global Diplomacy: An Introduction to Theory and Practice*. Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-28786-3>



- Bappeda Provinsi Lampung. (2017, May 17). Ekuador dan Provinsi Lampung Jajaki Kerjasama Sister Province. *Bappeda Provinsi Lampung*. https://bappeda.lampungprov.go.id/detail-post/ekuator-dan-provinsi-lampung-jajaki-kerjasama-sister-province?utm_source=chatgpt.com
- Christou, P. A. (2022). How to use thematic analysis in qualitative research. *Journal of Qualitative Research in Tourism*, 3(2), 79–95. <https://doi.org/10.4337/jqrt.2023.0006>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Dinas Kominfotik Provinsi Lampung. (2025, July 18). Lampung dan Ekuador Jajaki Kerjasama. *Dinas Kominfotik Provinsi Lampung*. <https://lampungprov.go.id/detail-post/lampung-dan-ekuator-jajaki-kerjasama>
- Fallahnda, B. (2022, December 21). Profil Provinsi Lampung: Sejarah, Geografis, Demografis, & Peta. *Tirto*. <https://tirto.id/profil-provinsi-lampung-sejarah-geografis-demografis-peta-gz4B>
- FAO. (2021). The State of Food Security and Nutrition in the World 2022. *Food and Agriculture Organization of the United Nations*. https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/6ca1510c-9341-4d6a-b285-5f5e8743cc46/content/sofi-2022/food-security-nutrition-indicators.html?utm_source=chatgpt.com
- FAO. (2024). The State of Food Security and Nutrition in the World 2024. *Food and Agriculture Organization of the United Nations*. https://www.fao.org/agrifood-economics/publications/detail/en/c/1707842/?utm_source=chatgpt.com
- Fathun, L. M. (2021). Paradiplomacy in Creating Regional Competitiveness: Case Study of Jember Regency. *Indonesian Perspective*, 6(2), 166–186. <https://doi.org/10.14710/ip.v6i2.43542>
- Food and Agriculture Organization. (2015). *Climate change and food security: Risks and responses*.
- Gonzalez, S. (2023). *Dairy and Products Annual* (Dairy and Products CI2023-0027; pp. 1–16). United State Department of Agriculture Foreign Agriculture Service. https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Dairy%20and%20Products%20Annual_Santiago_Chile_CI2023-0027.pdf
- Humas Kemenkop UKM. (2021, August 9). Punya Komoditas Pangan Unggulan, Lampung Potensial Jadi Penyangga Pangan Nasional. *Kompas*. <https://biz.kompas.com/read/2021/09/08/175702128/punya-komoditas-pangan-unggulan-lampung-potensial-jadi-penyangga-pangan-nasional>
- Johnston, M. P. (2017). *Secondary Data Analysis: A Method of which the Time Has Come*.
- Keating, M. (2020). Paradiplomacy and Regional Networking. *Forum of Federations: An International Federalism*. <https://www.forumfed.org/libdocs/ForRelCU01/924-FRCU0105-eu-keating.pdf>
- Khoerunnisa, R., & Maulana, Z. (2023). Para diplomacy through Sister City Cooperation: Efforts to Increase the Potential of the Agricultural Sector in Karawang District. *E3S Web of Conferences*, 444, 02045. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202344402045>
- Lestari, T. D. (2024). Analisis Ketahanan Pangan Rumah Tangga Berpendapatan Rendah di Provinsi Lampung. *Digilib Universitas Lampung*.

- [http://digilib.unila.ac.id/78111/3/3.%20TESIS%20FULL%20TANPA%20BAB%20P
EMBAHASAN.pdf](http://digilib.unila.ac.id/78111/3/3.%20TESIS%20FULL%20TANPA%20BAB%20P
EMBAHASAN.pdf)
- Malik, M. J. (2024, Agustus). *Implementasi Ekonomi Hijau di Sektor Pertanian Guna Penguatan Ketahanan Pangan Nasional*. Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. <http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010-092400000000073/swf/7844/59%20-%20M%20Jamaluddin%20Malik.pdf>
- Mukti, T. A., Fathun, L. M., Muhammad, A., Sinambela, S. I., & Riyanto, S. (2021). Paradiplomacy Policies and Regional Autonomy in Indonesia and Korea. *Jurnal Hubungan Internasional*, 9(2), 139–152. <https://doi.org/10.18196/jhi.v9i2.8931>
- Pambudi, M. A. L., & Handayani, T. (2023). Application of Sea Toll as a Means to Maintain the Availability of Goods in the 3T Area (Lagging, Frontier and Outermost). *Maritime Park Journal of Maritime Technology and Society*, 34–42. <https://doi.org/10.62012/mp.v2i2.26360>
- PPID Lampung. (2023, July 12). Salah Satu Penghasil Kelapa Terbesar di Indonesia, Provinsi Lampung Jadi Tuan Rumah Pertemuan Tingkat Menteri International Coconut Community (ICC) ke-59. *PPID Provinsi Lampung*. <https://ppid.lampungprov.go.id/detail-post/Salah-Satu-Penghasil-Kelapa-Terbesar-di-Indonesia-Provinsi-Lampung-Jadi-Tuan-Rumah-Pertemuan-Tingkat-Menteri-International-Coconut-Community-ICC-ke-59>
- Probowati, D. A. (2022, December). Paradiplomacy Between Lampung and Los Rios (Paradiplomasi antara Provinsi Lampung dan Kota Los Rios). *ResearchGate*. https://www.researchgate.net/publication/366593287_Paradiplomacy_Between_Lampung_and_Los_Rios_Paradiplomasi_antara_Provinsi_Lampung_dan_Kota_Los_Rios
- Raj, A., Devi, A. M., Singh, S. D., & Patel, M. (2024). *SUSTAINABLE AGRICULTURE PRACTICES*. https://www.researchgate.net/publication/384460974_SUSTAINABLE_AGRICULTURE_PRACTICES
- Rangga, K. K., Gultom, D. T., University of Lampung, Hasanuddin, T., University of Lampung, Viantimala, B., & University of Lampung. (2021). Effectiveness of Self-Help Groups in The Implementation of Livelihood Improvement Programs and Food Security in Lampung, Indonesia. *JOURNAL OF SUSTAINABILITY SCIENCE AND MANAGEMENT*, 16(4), 149–161. <https://doi.org/10.46754/jssm.2021.06.013>
- Safa'atin, H. N., & Denata, D. L. (2024). *ANALISIS STRATEGI PEMASARAN PRODUK LOKAL PADA PASAR GLOBAL*. 1(1).
- Sudrajat, A., Hertina, D., & Dyahrini, W. (2024). *SISTEM LOGISTIK DI INDONESIA: TINJAUAN KELEMBAGAAN DAN SISTEM INFORMASI*. 7(2).
- Tatiana, Vergara-Fernández, C., Argandoña-Castro, F., & Peña-Cortés, F. (2022). Agriculture and Temperate Fruit Crop Dynamics in South-Central Chile: Challenges for Fruit Crop Production in La Araucanía Region, Chile. *Land*, 11(6), 788. <https://doi.org/10.3390/land11060788>
- United Nations Children's Emergency Fund. (2022, September). No Time to Waste UNICEF's Acceleration Plan 2022–2023. *United Nations Children's Emergency Fund*. <https://www.unicef.org/media/127646/file/No%20Time%20to%20Waste.pdf>

- Utomo, A. B. (2022). Paradiplomacy as the product of state transformation in the era of globalisation: The case of Indonesia. *JANUS NET E-Journal of International Relation*, 13(1). <https://doi.org/10.26619/1647-7251.13.1.5>
- Valdivia, & Ranco. (2025). Los Ríos Region. *Fruits from Chile*. <https://fruitsfromchile.com/about/growing-regions/los-rios-region/>
- Villacis, A., Barrera, V., Alwang, J., Caicedo, C., Quiroz, J., & IDB Invest. (2022). *Strategies to strengthen Ecuador's high-value cacao value chain*. Inter-American Development Bank. <https://doi.org/10.18235/0003960>
- World Bank (Ed.). (2019). *World development report 2020: Trading for development in the age of global value chains*. World Bank Group.
- World Bank. (2021, March 7). Climate Smart Agriculture in Indonesia. *World Bank Group*. <https://documents1.worldbank.org/curated/en/752291622632903770/pdf/Climate-Smart-Agriculture-in-Indonesia.pdf>
- World Bank Group. (2025, March 17). Latest Food Security Data. *World Bank Group*. <https://www.worldbank.org/en/topic/agriculture/brief/food-security-update>
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. SAGE Publications.